BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan dana desa di Kampung Wersar Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan berdasarkan:

1. Dimensi *Enabling* belum efektif. Hal tersebut dapat dilihat pada sosialisasi program pemberdayaan belum berjalan optimal karena masih terbatas pada forum Musyawarah Kampung (Muskam) dan belum menyentuh seluruh elemen masyarakat secara berkelanjutan. Pelaksanaan seminar formal sebagai media motivasi belum dilaksanakan dan hanya melaksanakan pendekatan non-formal seperti pembentukan kelompok tani dan diskusi kelompok menjadi sarana pemberdayaan sehingga belum terstruktur dan berkelanjutan.
2. Dimensi *Empowering* belum efektif. Hal tersebut dapat dilihat pada fasilitasi pendidikan dan pelatihan belum terlaksana secara optimal, terutama bagi masyarakat umum akibat keterbatasan anggaran. Upaya pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh melalui pelatihan teknis dan berbasis kebutuhan lokal masih minim. Penyediaan akses informasi Pemerintah Kampung Wersar masih bergantung pada media tradisional seperti papan informasi,

baliho, dan undangan rapat, dengan dukungan terbatas dari infrastruktur digital sehingga jangkauannya belum merata dan interaksinya bersifat satu arah. Penyediaan sarana dan prasarana di Kampung Wersar, seperti lapangan olahraga dan jaringan pipa air bersih, mencerminkan komitmen terhadap pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kualitas hidup dan akses layanan dasar. Namun, efektivitasnya masih terbatas oleh minimnya fasilitas yang mendukung pengembangan kompetensi dan kurangnya pendampingan lanjutan.

3. Dimensi *Protecting* belum efektif karena regulasi yang adil masih bersifat terbatas dan belum sepenuhnya terlembaga dalam bentuk peraturan kampung yang sistematis. Selain itu, implementasinya terkendala oleh aspek pembiayaan dan rendahnya pola pikir masyarakat. Proses pengambilan kebijakan cenderung partisipatif, namun fokus regulatif masih terbatas pada penetapan penerima bantuan. Sistem pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya masih terbatas akibat lemahnya kapasitas evaluasi jangka panjang, rendahnya literasi masyarakat, dan praktik penyimpangan di tingkat kelompok penerima manfaat. Kurangnya sistem verifikasi berbasis data serta kontrol sosial yang kuat menghambat akuntabilitas dan keberlanjutan program. Pemberian akses khusus bagi masyarakat lemah melalui program-program seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), bedah

rumah, dan pengadaan air bersih mencerminkan komitmen pemerintah kampung terhadap inklusi sosial dan keadilan distribusi manfaat dana desa. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan jangkauan, dominasi kelompok sosial-ekonomi tertentu, serta rendahnya kapasitas SDM dan kesadaran masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran agar pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan dana desa di Kampung Wersar Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan lebih efektif, maka:

1. Pada dimensi *enabling*, pemerintah kampung perlu memperkuat strategi sosialisasi yang lebih inklusif melalui metode yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, seperti kampanye keliling, kunjungan rumah, serta pemanfaatan tokoh adat dan agama sebagai agen informasi. Selain itu, seminar formal dan pelatihan motivasional perlu diselenggarakan secara berkala guna memperkuat kesadaran kolektif terhadap tujuan pembangunan desa. Penggunaan media komunikasi alternatif seperti radio lokal, selebaran visual, dan grup pesan digital desa juga penting untuk memperluas jangkauan informasi.
2. Pada dimensi *empowering*, optimalisasi pelatihan teknis berbasis potensi lokal harus menjadi prioritas. Pemerintah kampung perlu

bermitra dengan balai pelatihan kerja, perguruan tinggi, atau LSM untuk menyediakan pelatihan intensif dan pendampingan berkelanjutan. Digitalisasi informasi publik melalui aplikasi informasi desa sederhana juga dapat mendukung peningkatan literasi warga. Di samping itu, penyediaan sarana fungsional seperti rumah produksi, kebun percontohan, dan balai pelatihan sangat diperlukan untuk memperkuat kompetensi dan produktivitas masyarakat secara langsung.

3. Pada dimensi *protecting*, perlu dilakukan reformulasi regulasi desa melalui penyusunan Peraturan Kampung (Perkam) yang jelas, partisipatif, dan berpihak kepada kelompok rentan. Sistem pengawasan partisipatif perlu diperkuat melalui pelibatan tokoh masyarakat, pemuda, dan perempuan, disertai pembentukan tim verifikasi lapangan yang aktif. Penguatan kapasitas aparat desa dalam hal manajemen program dan evaluasi dampak juga menjadi kunci efektivitas pengawasan. Selain itu, mekanisme distribusi bantuan harus berbasis data dan pemetaan sosial, guna menjamin inklusi kelompok rentan secara adil. Pengadaan *social audit* dan kanal pengaduan publik yang aman dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas.

C. Produk Tesis

Sebagai tindak lanjut atas hasil penelitian ini, penulis menyusun kedalam karya ilmiah policy brief yang berperan sebagai instrumen

advokasi berbasis data untuk menyajikan rekomendasi kebijakan yang ringkas dan terfokus serta aplikatif bagi seluruh pemangku kepentingan, khususnya bagi Kepala Kampung Wersar Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan. Melalui dokumen policy brief tersebut, hasil analisis mengenai dimensi *enablin*g, *empowering*, dan *protecting* dapat diterjemahkan ke dalam arah kebijakan yang responsif, inklusif, serta berorientasi pada peningkatan efektivitas pemanfaatan dana desa dalam mewujudkan pembangunan partisipatif dan berkeadilan sosial.